Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Di Indonesia Periode Tahun 2014-2023

Jonathan Brando Saragi[1], Nadia Vega Br Surbakti [2], Natalia[3], Tio Nardo Gulo[4]
[1,2,3,4]Fakultas Ekonomi/Universitas Negeri Medan
E-mail: jonathan.saragi2016@gmail.com[1], nadiavegasurbakti@gmail.com[2], nataliaatan5@gmail.com[3], tio300416@gmail.com[4]

Article History:
Received: 01 Desember 2024
Revised: 07 Desember 2024
Accepted: 14 Desember 2024

Keywords: *Interest Rate, Government Expenditure, Investment, Linear Regression*

Abstract: *This study aims to analyze the impact of Interest Rates and Government Expenditures on Investment in Indonesia during the 2014–2023 period using a quantitative method with multiple linear regression analysis. The data used in this research are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and Bank Indonesia, processed using SPSS software. The simultaneous test results show that Interest Rates and Government Expenditures jointly have a significant effect on Investment, with an F statistic value of 90.047 and a significance level of 0.000 < 0.05. However, on a partial basis, only Government Expenditures significantly influence Investment (t statistic = 11.165; sig. = 0.000 < 0.05), while Interest Rates do not show a significant effect (t statistic = 1.493; sig. = 0.0895 > 0.05). These findings indicate that fiscal policy, through Government Expenditures, plays a more dominant role in driving investment levels compared to monetary policy through Interest Rates.*

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, jumlah yang besar, serta potensi pasar domestik yang sangat besar. Meskipun demikian, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, terutama mengingat ketergantungan negara ini pada komoditas dan fluktuasi pasar global. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendiversifikasi perekonomian, termasuk mengembangkan sektor manufaktur dan jasa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Indonesia dalam menarik dan mempertahankan investasi, baik domestik maupun asing. Investasi adalah salah satu motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta memodernisasi infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Tanpa adanya investasi yang signifikan, upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di pasar global akan terhambat. Oleh karena itu, menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Investasi memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Sebuah negara, seperti halnya Indonesia, yang merupakan salah satu ekonomi berkembang terbesar di Asia Tenggara, Indonesia membutuhkan investasi yang kuat untuk mendorong pembangunan sektor-sektor vital seperti infrastruktur, manufaktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Tanpa adanya arus investasi yang berkelanjutan, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, seperti peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Oleh sebab itu, memahami berbagai faktor yang memengaruhi keputusan investasi di Indonesia, dari perspektif dalam negeri hingga internasional. Dalam penelitian ini, Investasi akan menjadi variabel dalam pembahasan penelitian ini yang dimana dalam periode yang sudah ditentukan, yaitu Investasi pada periode tahun 2014-2023.

Ada beberapa spek kunci yang berdampak pada keputusan investasi antara lain tingkat suku bunga, pengeluaran pemerintah, inflasi, stabilitas politik, infrastruktur, kebijakan perpajakan, dan nilai tukar mata uang. Tingkat suku bunga, misalnya, menentukan biaya modal yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, di mana suku bunga rendah secara teori akan mendorong investasi melalui penurunan biaya pinjaman. Sementara itu, pengeluaran pemerintah, khususnya dalam sektor infrastruktur, berfungsi sebagai katalis yang meningkatkan daya tarik investasi swasta dengan menciptakan fasilitas pendukung dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selain kedua faktor tersebut, tingkat inflasi yang terkendali, stabilitas politik yang terjaga, dan infrastruktur yang memadai juga menjadi elemen berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi.

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada dua faktor utama, yaitu tingkat suku bunga dan pengeluaran pemerintah, karena keduanya memiliki peran signifikan dalam menentukan arah investasi di Indonesia. Periode 2014-2023 dipilih karena mencakup berbagai dinamika ekonomi, seperti fluktuasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, peningkatan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur, serta dampak ketidakpastian global seperti pandemi COVID-19.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi investasi adalah kebijakan moneter yang tercermin dalam penetapan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengelolaan inflasi, serta pengendalian likuiditas dan arus modal. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengurangi minat investasi, karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah dapat menarik pelaku ekonomi untuk berinvestasi, karena pembiayaan menjadi lebih terjangkau.

Namun, kebijakan suku bunga tidak dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi tingkat investasi. Faktor lain yang memiliki pengaruh besar adalah pengeluaran pemerintah, yang mencakup berbagai program pembangunan dan belanja fiskal. Pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor prioritas lainnya dapat menciptakan kondisi yang mendukung investasi. Misalnya, pembangunan infrastruktur dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi pasar, serta menarik investor untuk berinvestasi di sektor-sektor yang membutuhkan infrastruktur yang memadai.

Indonesia telah mencatatkan beberapa kemajuan dalam pengembangan infrastruktur dalam beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur melalui berbagai program, seperti Program Infrastruktur Nasional (PIN) dan pembangunan proyek-proyek strategis di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan belanja publik di sektor ini dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, terutama di sektor-sektor seperti transportasi, energi, dan properti. Pembangunan infrastruktur yang baik diharapkan dapat mengurangi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat aliran

investasi ke sektor-sektor tersebut.

Namun, meskipun pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif bagi investasi, sektor swasta juga sangat dipengaruhi pada kebijakan fiskal dan moneter yang stabil. Ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi atau fluktuasi suku bunga yang tajam dapat menyebabkan investor menunda atau membatalkan rencana investasi mereka. Dengan demikian, keseimbangan dari kebijakan suku bunga dan pengeluaran pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan iklim ekonomi yang mendukung arus investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Periode 2014 hingga 2023 merupakan periode yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Di awal periode ini, Indonesia mengalami penurunan harga komoditas global yang memengaruhi daya saing ekspor Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia berhasil melakukan diversifikasi perekonomian dengan meningkatkan belanja infrastruktur dan memperkenalkan berbagai kebijakan yang mendukung sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global dan dinamika perdagangan internasional, yang memengaruhi arus investasi. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia sangat menentukan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan investasi.

Di tahun 2020, dunia menghadapi krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Dampak dari pandemi ini sangat signifikan, bukan hanya terhadap sektor kesehatan, namun juga terhadap perekonomian global dan domestik. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang dalam, yang menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah luar biasa, termasuk meningkatkan pengeluaran fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Di sisi lain, Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk mengurangi biaya pembiayaan dan merangsang permintaan domestik. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat meredakan dampak negatif pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

Dampak dari kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan selama pandemi terhadap tingkat investasi di Indonesia sangat penting untuk dianalisis. Suku bunga yang lebih rendah dan pengeluaran pemerintah yang meningkat memang dapat memberikan stimulus bagi perekonomian, tetapi efek jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap arus investasi perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Pengaruh kebijakan ini dapat berbeda-beda tergantung pada sektor yang dianalisis, baik itu sektor infrastruktur, manufaktur, atau sektor ekonomi baru seperti ekonomi digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami interaksi antara kebijakan moneter, pengeluaran pemerintah, dan keputusan investasi yang dibuat oleh sektor swasta.

Dari 10 tahun terakhir, Perekonomian Indonesia selalu dilanda oleh banyak peristiwa dan faktor-faktor yang tidak terduga seperti masa COVID-19 pada tahun 2020 yang dimana terjadi krisis ekonomi mendadak yang dimana Pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dalam kehidupannya yang seperti di PHK massal, Peristiwa seperti ini juga berdampak terutama dalam sektor Investasi. Jadi,Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga (Variabel X1) dan pengeluaran pemerintah (Variabel X2) terhadap tingkat investasi (Variabel Y) di Indonesia selama periode 2014 hingga 2023. Dengan menggunakan data empiris, penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana kebijakan fiskal dan moneter memengaruhi keputusan investasi pada periode tahun tersebut, serta dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Data yang disajikan dibawah ini ialah data yang sudah disediakan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan Bank Indonesia.

Tabel 1.Data Variabel Penelitian

Tingkat Suku Bunga (X1)	PengeluaranPemerintah (X2)	Investasi (Y)
7.58	1777182.80	156126.3
7.50	1806515.20	179465.9
5.96	1864275.10	216230.8
4.50	2007351.80	262350.5
5.13	2213117.80	328604.9
5.71	2309287.30	386498.4
4.00	2595481.10	413535.5
3.65	2786411.40	447063.6
3.46	3096262.70	552769.0
6.00	3123677.30	674923.4

LANDASAN TEORI

Investasi

Menurut Winardi (1992), investasi adalah sejumlah modal yang berupa uang yang digunakan untuk membeli peralatan produksi dan produk yang akan dijual kemudian. Secara keseluruhan, investasi didefinisikan sebagai penambahan stok modal untuk memenuhi kebutuhan belanja sektor bisnis selama jangka waktu tertentu (Nanga, 2005).

Sedangkan Menurut Halim (2005:1), investasi merupakan keuntungan yang akan diperoleh sebagai hasil dari peraturan yang menambah dana. Investasi dibagi menjadi dua kategori yaitu : investasi negara (investasi pihak pemerintah) dan investasi swasta (investasi pihak swasta). Pada akhirnya perkembangan kedua jenis investasi ini terdapat pula investasi asing , yang dilakukan oleh pihak pemerintah asing maupun swasta asing (Winardi, 1992).

Investasi secara umum juga dikenal sebagai pembentukan modal atau penanaman modal. Menurut Suherman (2009:185), investasi harus berarti penambahan barang modal baru. Namun, menurut Mankiw(2001:476), investasi adalah komponen GDP yang menghubungkan masa kini dan masa depan, dan pengeluaran untuk barang investasi bertujuan untuk meningkatkan standar hidup untuk tahun-tahun mendatang. Kemudian Menurut Kamaruddin dalam "Salim" (2008:32), investasi adalah menempatkan dana atau uang dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu.

Akumulasi modal terjadi ketika sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali untuk meningkatkan pendapatan dan output di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin, peralatan, dan bahan baku meningkatkan stok modal fisik negara, yang merupakan nilai riil "neto" dari seluruh barang modal produktif secara fisik. Pengadaan ini jelas memungkinkan peningkatan output di masa depan (Todaro, 2003:92). "Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor—faktor yang mempengaruhi atau tidak", kata Salim (2008:37).

Menurut Smith, investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan keuntungan, dan kemungkinan keuntungan masa depan bergantung pada iklim investasi saat ini dan keuntungan nyata (Hakim, 2002).

Teori Neo Klasik

Menurut teori Neo Klasik, suatu investasi akan dilakukan apabila pendapatan lebih besar dari tingkat bunga. Investasi dalam barang modal akan menguntungkan jika biaya sewa ditambah bunga lebih kecil daripada pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut.

Teori Keynes

Yang menjadi dasar permasalahan dalam teori investasi Keynes, ialah Konsep Marginal Efiiciency of Investment (MEI) lebih besar dari pada tingkat bunga baik dalam hal penentuan jumlah investasi maupun kesempatan untuk melakukannya.

Teori Klasik

Menurut teori Klasik, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan potensi produksi masyarakat. Dengan demikian, investasi dianggap sebagai pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah alat produksi dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. faktor biaya modal, yaitu tingkat bunga dan keuntungan yang diharapkan dari investasi, akan menjadi bahan pertimbangan bagi seorang investor untuk melakukan suatu investasi. Selain itu faktor lain seperti perkembangan teknologi, akumulasi modal, pajak, dan perkiraan dan harapan tentang kondisi ekonomi di masa depan juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi investor yang ingin melakukan investasi .

Menurut Sukirno (1994), semakin rendah tingkat bunga yang dibayar pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat mereka lakukan. Tingkat suku bunga sangat penting untuk perekonomian karena menentukan investasi dan permintaan agregat. Ketika tingkat suku bunga rendah, volume investasi meningkat, sedangkan ketika tingkat suku bunga tinggi, permintaan akan uang untuk investasi rendah. Keuntungan yang diharapkan dari pengeluaran modal, atau efisiensi investasi, adalah komponen penting lainnya yang sangat mempengaruhi investasi.

Tingkat Suku Bunga (BI RATE)

Menurut *Setiawan* (2021**)**, BI Rate berfungsi sebagai instrumen kunci dalam kebijakan moneter yang memengaruhi seluruh sektor perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, ketika BI Rate diturunkan, biaya pinjaman menjadi lebih murah, yang mendorong aktivitas investasi dan konsumsi. Di sisi lain, ketika BI Rate dinaikkan, pengeluaran domestik cenderung berkurang karena biaya kredit yang lebih tinggi, yang pada gilirannya membantu mengendalikan inflasi. *Mishkin* (2007) juga menjelaskan bahwa suku bunga acuan merupakan alat yang digunakan oleh bank sentral untuk memengaruhi pergerakan likuiditas dan inflasi dalam perekonomian suatu negara. Dalam konteks Indonesia, perubahan BI Rate diharapkan dapat menstabilkan perekonomian dan mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Putra (2017) dalam penelitiannya tentang *dampak BI Rate terhadap investasi sektor infrastruktur di Indonesia* menyatakan bahwa penurunan BI Rate secara langsung berhubungan positif dengan peningkatan investasi, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan besar, seperti infrastruktur. Kebijakan suku bunga yang lebih rendah memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan BI Rate dapat merangsang sektor-sektor yang padat modal untuk memperluas kegiatan investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Selain itu, *Suwignyo* (2019) mengungkapkan bahwa pengaruh BI Rate terhadap sektor investasi juga bergantung pada sektor yang lebih sensitif terhadap perubahan biaya modal. Penurunan suku bunga cenderung meningkatkan permintaan terhadap kredit, yang pada gilirannya merangsang kegiatan investasi di sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan properti. Sektor-sektor ini sangat rentan terhadap fluktuasi suku bunga karena mereka memerlukan pembiayaan yang besar untuk mendanai perkembangan dan inisiatif baru.

Suku bunga juga berperan dalam mengendalikan inflasi. *Mishkin* (2007) menyatakan bahwa suku bunga digunakan untuk mengendalikan inflasi melalui mekanisme pengaruh terhadap permintaan agregat. Ketika inflasi tinggi, Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate untuk mendinginkan perekonomian, mengurangi permintaan kredit, dan menurunkan konsumsi. Sebaliknya, ketika inflasi rendah atau ekonomi sedang dalam kondisi stagnan, BI Rate dapat diturunkan untuk merangsang investasi dan konsumsi yang lebih tinggi. *Wibowo* (2020) juga mencatat bahwa kebijakan penurunan BI Rate selama masa krisis atau resesi, seperti pada saat pandemi COVID-19, berhasil menurunkan laju inflasi dan memberikan stimulus bagi

perekonomian yang terdampak.

Selain pengaruh terhadap inflasi domestik, *Harrison* (2015) menekankan bahwa suku bunga acuan juga memengaruhi aliran modal internasional. Ketika suku bunga Indonesia lebih tinggi daripada suku bunga negara maju, hal ini dapat menarik lebih banyak investasi asing karena menawarkan imbal hasil yang lebih besar. Namun, ketika suku bunga Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, maka arus modal cenderung keluar, yang dapat mempengaruhi kestabilan nilai tukar dan tekanan pada pasar keuangan domestik. *Krugman* (1999) dalam karyanya tentang ekonomi internasional menjelaskan bahwa perbedaan suku bunga antara negara berkembang dan negara maju merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan investor internasional dalam memilih tempat investasi.

Taylor (1993) dalam teori "Taylor Rule" mengemukakan bahwa bank sentral harus menetapkan suku bunga berdasarkan tingkat inflasi dan output gap—perbedaan antara output aktual dan output potensial. Dengan kata lain, kebijakan suku bunga seharusnya lebih responsif terhadap perubahan dalam inflasi dan kondisi ekonomi. Hal ini relevan dengan kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh Bank Indonesia. *Sitorus & Prabowo* (2018) juga menekankan pentingnya pengaturan BI Rate yang responsif terhadap kondisi ekonomi global dan domestik, karena perubahan eksternal dapat dengan cepat mempengaruhi kestabilan ekonomi domestik, termasuk dalam hal arus modal dan nilai tukar.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan suku bunga di Indonesia adalah ketergantungan terhadap faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan moneter di negara-negara besar dan fluktuasi harga komoditas. *Blanchard dan Johnson* (2013) mengingatkan bahwa meskipun suku bunga yang lebih rendah dapat merangsang konsumsi dan investasi, kebijakan moneter yang terlalu longgar dalam jangka panjang dapat berisiko menimbulkan ketidakstabilan makroekonomi, seperti gelembung aset atau peningkatan utang yang tidak terkendali. *Setiawan* (2021) menyebutkan bahwa kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh Bank Indonesia harus selalu mempertimbangkan dinamika eksternal, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global, seperti krisis keuangan atau perubahan suku bunga di negara maju yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi domestik.

Tantangan lebih lanjut yang dihadapi dalam pengelolaan BI Rate adalah dampaknya terhadap stabilitas keuangan. Menurut *Mishkin* (2007), Penurunan suku bunga yang berlebihan dalam jangka panjang dapat mendorong para investor untuk mencari peluang dengan risiko lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini dapat berujung pada pembentukan gelembung aset di pasar properti atau pasar saham. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kebijakan suku bunga yang merangsang investasi dan kebijakan yang menjaga kestabilan pasar keuangan agar tidak terjadi ketidakseimbangan ekonomi yang berbahaya. Pada akhirnya, *Putra* (2017) dan *Suwignyo* (2019) menyimpulkan bahwa BI Rate memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia, terutama pada hal investasi serta konsumsi.

Pengeluaran Pemerintah

Menurut *Suyanto* (2020), pengeluaran pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan pengeluaran, terutama di sektor infrastruktur, berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi serta memperbaiki daya saing nasional. Suyanto mencatat bahwa sektor infrastruktur membutuhkan investasi yang besar, dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur memberikan multiplier effect yang dapat merangsang kegiatan ekonomi di berbagai sektor, seperti konstruksi, manufaktur, dan perdagangan. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah di sektor ini memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Fatimah dan Daryanto (2018) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah yang

difokuskan pada pembangunan sosial seperti pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Keduanya menyoroti bahwa pengeluaran di sektor pendidikan memiliki efek langsung terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan daya saing negara. Demikian pula, pengeluaran di sektor kesehatan dapat memperpanjang usia produktif masyarakat, mengurangi beban penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah yang terarah pada sektor sosial dianggap krusial untuk pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Setiawan (2021) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah juga berperan dalam menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif atau kontraktif. Pada masa resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya untuk merangsang permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja baru. Sebaliknya, selama periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya untuk mencegah inflasi yang berlebihan dan menjaga keseimbangan fiskal. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi siklus ekonomi yang sedang berlangsung agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan.

Selain itu, *Sitorus* (2022) menyoroti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Program-program sosial yang dianggarkan dalam APBN, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi energi, dapat membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sitorus menambahkan bahwa meskipun pengeluaran pemerintah di sektor sosial berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, pengeluaran yang tidak terarah dan tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih produktif.

Purnomo dan Susanto (2019) membahas hubungan antara *pengeluaran pemerintah dan investasi* dalam perekonomian Indonesia. Mereka mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar dapat menarik investasi swasta, baik domestik maupun asing. Misalnya, pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara dapat membuka akses yang lebih baik untuk perdagangan dan distribusi barang, yang pada gilirannya menciptakan peluang investasi baru. Purnomo dan Susanto juga menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Menurut *Wibowo* (2020**)**, pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif pada stabilitas fiskal. Ketika pengeluaran pemerintah melebihi kapasitas pendapatan negara, hal ini dapat meningkatkan defisit anggaran dan menyebabkan pembengkakan utang publik. Wibowo menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang prudent (bijaksana) agar pengeluaran pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengeluaran yang berlebihan atau tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan tekanan pada keuangan negara dan memperburuk ketergantungan pada pinjaman luar negeri.

Fahmi dan Irma (2018) juga mengemukakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor yang padat karya, seperti pertanian dan pariwisata, dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Fahmi dan Irma mencatat bahwa sektor-sektor ini, meskipun tidak selalu mendapatkan alokasi anggaran yang besar, memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat karena mereka melibatkan penciptaan banyak kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan per kapita.

Suharto (2019) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang berfokus pada program pemberdayaan ekonomi lokal dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Pengeluaran dalam bentuk subsidi atau bantuan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memperkuat daya saing ekonomi lokal dan membantu masyarakat untuk keluar dari

kemiskinan. Suharto menekankan bahwa program-program yang berbasis komunitas akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Di sisi lain, *Harahap* (2021) memperingatkan bahwa pengeluaran pemerintah yang terlalu fokus pada subsidi dapat menghambat reformasi struktural yang diperlukan untuk mendorong efisiensi ekonomi. Harahap mengungkapkan bahwa subsidi energi, misalnya, sering kali dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu, sementara mereka yang membutuhkan bantuan sosial justru kurang mendapat manfaat.

Menurut teori. Pengeluaran pemerintah seharusnya memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat investasi di suatu negara. Menurut *Purnomo dan Susanto* (2019**)**, pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat meningkatkan daya tarik investasi dari perspektif dalam negeri hingga internasional. Hal ini terjadi karena infrastruktur yang baik mengurangi biaya logistik, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mendukung kelancaran arus barang dan jasa. *Setiawan* (2021) juga menambahkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor produktif, seperti energi dan transportasi, dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena memberikan kepastian dan efisiensi bagi investor. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang konsisten dan terarah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang, yang pada gilirannya dapat merangsang minat investasi. Namun, jika pengeluaran pemerintah tidak dikelola dengan baik dan mengarah pada pemborosan, hal ini justru dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi negara.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi ini mencakup semua data Tingkat Suku Bunga (BI RATE), Pengeluaran Pemerintah (Pengeluaran Negara), dan data Investasi Indonesia pada periode tahun 2014-2023. Sampel yang dipakai dalam studi ini seluruhnya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Dalam studi ini, menggunakan data yang dikumpulkan selama 10 Tahun terakhir (2014-2023) untuk memastikan bahwa analisis mencakup trend dan pola yang relevan dalam periode tersebut.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui pencarian data di Internet, dan mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber yang tepercaya. Data yang diperlukan mencakup:

- Data Tingkat Suku Bunga (**BI RATE**) selama periode 2014-2023 yang diambil dari sumber resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- Data Pengeluaran Pemerintah (**Pengeluaran Negara**) pada periode yang sama yaitu 2014-2023. Data ini diambil dari publikasi yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Data Investasi Indonesia (**Penanaman Modal Dalam Negeri**) selama periode yang sama juga yaitu tahun 2014-2023. Data ini diambil dari publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS).

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data yang menggunakan Model Ekonometrika seperti Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear berganda yang di mana untuk menguji pengaruh BI RATE dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Investasi di Indonesia, dan uji Koefisien Determinasi. Data yang telah terkumpulkan akan diolah memakai aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

1. **Uji Asumsi Klasik**

Uji Normalitas

Tabel 2. Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TINGKAT SUKU BUNGA	PENGELUARAN PEMERINTAH	INVESTASI
N		10	10	10
Normal Parameters[a,b]	Mean	5.3490	2357956.2500	361756.8300
	Std. Deviation	1.47479	516698.21880	167597.98559
Most Extreme Differences	Absolute	.129	.151	.123
	Positive	.129	.151	.123
	Negative	-.128	-.131	-.110
Test Statistic		.129	.151	.123
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]	.200[c,d]	.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel diatas, hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh dari pengelolaan SPSS menunjukkan nilai 0,200 > 0,05, Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi ini mencukupi uji normalitas, Sehingga hipotesis dapat dibentuk.

Hipotesis

Dari data yang sudah disajikan pada bagian pendahuluan, Bisa diketahui bahwa Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Tingkat Suku Bunga dan Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Tingkat Investasi Indonesia. Dari uraian ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut

H1 : Diduga Tingkat Suku Bunga (X1) terdapat pengaruh signifikan terhadap tingkat Investasi (Y) di Indonesia.

H0 : Diduga Tingkat Suku Bunga (X1) tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap tingkat Investasi (Y) di Indonesia.

H2 : Diduga Pengeluaran Pemerintah (X2) terdapat pengaruh signifikan terhadap tingkat Investasi (Y) di Indonesia.

H0 : Diduga Pengeluaran Pemerintah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap tingkat Investasi di Indonesia.

H3 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Suku Bunga (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) terhadap Tingkat Investasi (Y) di Indonesia.

H0 : Diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Suku Bunga (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) terhadap Tingkat Investasi (Y) di Indonesia.

2. Uji Regresi Berganda

a. Tabel Descriptive Statistics

Tabel descriptive Statistics berisi keadaan diskriptif variabel**.** Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk memahami sifat atau karakteristik dari data yang digunakan dalam penelitian. Untuk mempermudah pemahaman tentang data terkait Tingkat Suku Bunga, Pengeluaran Pemerintah, dan Investasi, informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Desrcriptive Statistics

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tingkat Suku Bunga	10	5.3490	1.47479
Pengeluaran Pemerintah	10	2357956.2500	516698.21880
Investasi	10	361756.830	167597.9856
Valid N (listwise)	10		

Dari tabel diatas dikenali maka nilai rata-rata yang dimiliki variabel Investasi tahun 2014-2023 adalah sebesar 361756.8300, dengan standar deviasi yang dimiliki sebesar 167597.98559. Nilai rata-rata variabel Tingkat Suku Bunga (X1) sebesar 5.3490, dengan standar deviasi yang dimiliki sebesar 1.47479 dan nilai rata-rata variabel Pengeluaran Pemerintah (X2) sebesar 2357956.2500, dengan standar deviasi yang dimiliki sebesar 516698.21880.

b. Tabel Model Summary

Uji Koefisien Determinasi, Menurut Widarjono (2015:17), Mengukur proporsi keseluruhan variabel dependen dalam garis regresi yang dijelaskan oleh variabel independen. Tabel berikut ini memberikan penjelasan hasil dari pengujian koefisien determinasi.

Tabel 4. Model Summary

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981[a]	.963	.952	36758.79480

a. Predictors: (Constant), PENGELUARAN PEMERINTAH, TINGKAT SUKU BUNG

Dari Model Summary diatas menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi berganda (R) sebesar 0.981 dan juga nilai koefisien determinasi regresi berganda sebesar 0,963. Artinya **96,3% Investasi (Y) dapat dijelaskan melalui variasi nilai variabel Tingkat Suku Bunga dan Pengeluaran Pemerintah. Sedangkan sisanya 3,7% dipengaruhi variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini**.

c. Tabel Anova

Tabel 5. Anova

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	243343299991.132	2	121671649995.566	90.047	.000[b]
	Residual	9458462966.109	7	1351208995.158		
	Total	252801762957.241	9			

a. Dependent Variable: Investasi

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan Tabel 4. Anova di atas menjelaskan bahwa uji signifikansi koefisien regresi berganda atau uji simultan (Hipotesis 3) diperoleh nilai F hitung sebesar 90.047 dan F tabel untuk alpha α = 0,05; dk = 2 db2 = 10-2-1= 7 yaitu F table (0,05.2:7) = 3.98, Sehingga F hitung (90.047) > F tabel (4.74) atau jika memakai nilai Sig. Sebesar 0.000 < 0.05 maka **Ha diterima**, Maka hal ini menyimpulkan **diduga bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Suku Bunga (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) terhadap Tingkat Investasi (Y).**

d. Tabel Coeffisient

Tabel 6. Coeffisient

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	540945.657	119657.753		-4.521	.003
	Tingkat Suku Bunga	-16211.139	10859.296	.143	1.493	.179
	Pengeluaran Pemerintah	.346	.031	1.067	11.165	.000

a. Dependent Variable: Investasi

Dari hasil pengujian persamaan regresidari applikasi SPSS, Bisa diketahui dari Variabel X1 dan X2 terhadap Variabel Y. Dari korelasi variabel, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 540945.657 - 16211.139\ X_1 + 0.346\ X_2$$

Keterangan:

Y = Investasi
X_1 = Tingkat Suku Bunga (BI RATE)
X_2 = Pengeluaran Pemerintah

Makna Persamaan Regresi:

a. Konstanta sebesar 540945.657. Artinya jika **Tingkat Suku Bunga dan Pengeluaran Pemerintah adalah 0, maka Tingkat Investasi sebesar 540.945.657 Juta Rupiah**.
b. Koefisien regresi variable Tingkat Suku Bunga sebesar 16211.139. Artinya **setiap kenaikan Tingkat Suku Bunga (BI RATE) 1 persen, maka tingkat Investasi akan menurun sebesar 16.211.139 Milyar Rupiah**.
   - Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa semakin meningkat Tingkat Suku Bunga (BI RATE), maka Investasi semakin menurun.
c. Koefisien regresi variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar 0.346. Artinya **setiap kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 1 Milyar Rupiah, maka Investasi akan meningkat sebesar 0.346 Milyar Rupiah.**
   - Koefisien regresi bernilai Positif menunjukkan bahwa semakin meningkat Pengeluaran Pemerintah maka Investasi mengalami peningkatan.

Dari hasil regresi diatas, maka bisa diperoleh hasil sebagai berikut.

a. Hipotesis 1 Pengaruh Parsial Tingkat Suku Bunga (X1) Terhadap Investasi (Y)

Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Investasi dengan mengontrol variable Pengeluaran Pemerintah diperoleh nilai t hitung sebesar 1.493 dengan perolehan t tabel pada a = 0,05 dan db = 7 yakni sebesar 1.89458 Sehingga t hitung (1.493) < t tabel (1.89458), maka **Ho diterima**. Jika memakai nilai Sig,sebesar 0.179/2 = 0,0895, maka Sig. 0,0895 > 0,05, artinya **Ho diterima**. Ini artinya tidak tedapat pengaruh signifikan dari Tingkat Suku Bunga pada Investasi. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan *Muhammad Akmal Fadilah* yang berjudul "ANALISIS PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB), SUKU BUNGA BI (BI RATE), DAN INFLASI TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG (PMA) DI INDONESIA TAHUN 2006-2015" hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Tingkat Suku Bunga (BI RATE)

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Investasi.

b. Hipotesis 2 Pengaruh Parsial Pengeluaran Pemerintah (X2) Terhadap Investasi (Y)

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi dengan mengontrol variable Tingkat Suku Bunga diperoleh nilai t hitung sebesar 11.165 dengan perolehan t tabel pada a = 0,05 dan db = 7 yakni sebesar 1.89458 Sehingga t hitung (11.165) > t tabel (1.89458), maka **Ha diterima**. Jika memakai nilai Sig,sebesar 0.000/2 = 0,000, maka Sig. 0,000 < 0,05, artinya **Ha diterima**. Dari hasil diatas, bisa disimpulkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Investasi. Temuan ini sejalan dengan kajian sebelumnya oleh Khusnul *Qoyimah, Anifatul Hanim, Fajar Wahyu P* yang berjudul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi di Jawa Timur Periode 1982-2012" yang mengatakan bahwa Variabel Pengeluaran Pemerintah (G) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan investasi di Jawa Timur, dan penelitian oleh *Estu Prihatiningsih, Agus Wantara* yang berjudul "ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, SUKU BUNGA, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA TAHUN 1992–2012" mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap investasi.

KESIMPULAN

Dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pengaruh simultan (uji F) memberikan bahwa variabel Tingkat Suku Bunga dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Investasi Sedangkan pengaruh parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Tingkat Suku Bunga tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Investasi dan variabel Pengeluaran Pemerintah tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Investasi. Ini disebabkan karena saat periode selama 10 tahun dari 2014-2023 Investasi lebih dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang termasuk pengeluaran pemerintah dan pada periode ini stabilitas tingkat suku bunga ini menyebabkan tidak terlalu kelihatan pengaruh nya terhadap Investasi atau dengan kata lain menyebabkan variabilitas data rendah (data variabelnya tidak banyak berubah), Atau simpelnya, investasi di Indonesia cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter seperti kebijakan fiskal pemerintah yang agresif dalam mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran. Dan hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah menjadi pendorong utama investasi, sementara tingkat suku bunga, meskipun relevan dalam teori ekonomi, memiliki dampak yang relatif kecil karena pelaku usaha mungkin lebih mengandalkan sumber pendanaan lain seperti ekuitas, penanaman modal asing, atau obligasi, daripada pinjaman bank. Selain itu, Bank Indonesia dalam periode penelitian ini cenderung menjaga stabilitas suku bunga dalam rentang tertentu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga pelaku usaha tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi kecil dalam tingkat suku bunga tersebut. Dan seperti yang kita tau pada tahun 2020 COVID-19 mulai masuk ke Indonesia yang membuat adanya ketidakpastian global, Yang dapat membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam berinvestasi, terlepas dari rendahnya biaya pinjaman.

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Investasi artinya pada periode penelitian ini Pengeluaran Pemerintah banyak diarahkan ke pembangunan Infrastruktur yang dimana akan menimbulkan kepercayaan Investor untuk menginvestasikan berupa dananya ke dalam usaha dalam sektor-sektor dan bidang usaha diIndonesia. Atau dengan kata lain, Pemerintah secara konsisten meningkatkan belanja untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek energi, yang menciptakan efek multiplier dalam perekonomian. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh sektor swasta, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor

terkait, seperti konstruksi, transportasi, dan logistik. Selain itu, Pengeluaran Pemerintah menjadi penyeimbang saat COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Ketika sektor swasta ragu untuk berinvestasi karena risiko ekonomi, pengeluaran pemerintah memberikan kepastian dengan menciptakan permintaan yang stabil. Hal ini terutama terlihat dalam alokasi anggaran besar untuk program pemulihan ekonomi nasional dan belanja sosial yang menjaga daya beli masyarakat. Jadi, Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar bisa menganalisis masalah masalah yang terjadi pada periode tertentu dalam konteks variabel yang akan dibahas dalam penelitian.

DAFTAR REFERENSI

Qoyimah, K. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi di Jawa Timur Periode 1982-2012.

Prihatiningsih, E. (2015). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Di Indonesia Tahun 1992-2012. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1-15.

Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Makroekonomi* (Penerjemah: Nurul Huda). Jakarta: Erlangga.

Harrison, G. W. (2015). *Macroeconomics: Understanding the Global Economy*. Wiley.

Harrison, G. W. (2015). *Makroekonomi: Memahami Ekonomi Global* (Penerjemah:Denny Kurniawan). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Mishkin, F. S. (2007). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (8th ed.). Pearson Education.

Putra, F. P. (2017). *Pengaruh BI Rate Terhadap Investasi Sektor Infrastruktur di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 19(2), 112-130.

Setiawan, F. (2021). *Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Aliran Modal dan Investasi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Makro dan Mikro, 22(1), 55-70.

Sitorus, F., & Prabowo, I. (2018). *Dampak Kebijakan BI Rate terhadap Sektor Industri di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Indonesia, 15(3), 84-98.

Suwignyo, A. S. (2019). *Pengaruh BI Rate terhadap Arus Investasi Asing di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 10(1), 35-50.

Taylor, J. B. (1993). *Discretion versus Policy Rules in Practice*. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.

Wibowo, H. (2020). *Dampak Penurunan BI Rate terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18(4), 75-90.

Fahmi, A., & Irma, S. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian dan pariwisata. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 140-155.

Fatimah, S., & Daryanto, Y. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 19(3), 201- 216.

Harahap, H. (2021). Dampak pengeluaran subsidi energi terhadap ketimpangan sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 92-108.

Purnomo, D., & Susanto, B. (2019). Peran pengeluaran pemerintah dalam menarik investasi sektor infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 10(1), 45-60.

Setiawan, F. (2021). Pengaruh kebijakan pengeluaran pemerintah terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 22(1), 75-90.

Sitorus, F. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 13(2), 56-70.

Wibowo, H. (2020). Dampak pengeluaran pemerintah terhadap stabilitas fiskal di Indonesia.

Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18(4), 75-90.

Purnomo, D., & Susanto, B. (2019). Peran pengeluaran pemerintah dalam menarik investasi sektor infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 10(1), 45-60.

Setiawan, F. (2021). Pengaruh kebijakan pengeluaran pemerintah terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 22(1), 75-90.